

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK L E G I M A N *

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), merupakan representasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait. Adanya nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam, yang secara normatif harus diterapkan oleh umat Islam. Sementara di sisi lain, telah diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap konsumen Indonesia, termasuk para konsumen muslim; memunculkan keingintahuan untuk memperoleh kejelasan, bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Pengaturan hukum jual beli online dalam perspektif ekonomi islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata dan akad dalam hukum ekonomi Islam. Jual beli online dalam Hukum Ekonomi Islam diatur dalam Fatwa DSN/MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli haruslah cakap hukum yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 menyatakan bahwa pengguna online shop harus memahami serta menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan dan bertanggung jawab agar aktivitas jual beli online berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 dan kewajiban konsumen dalam Pasal 5. Pelaksanaan jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Skema jual beli yang harus diperhatikan adalah: Pertama, berkaitan dengan barang yang dibeli. Kedua, bagaimana cara membelinya. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online perspektif ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama-sama memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dengan membebaskan pertanggungjawaban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, JualBeli Online, Ekonomi Islam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN ONLINE BUYING
AND BUYING FROM A PERSPECTIVE
ISLAMIC ECONOMICS AND LAW
CONSUMER PROTECTION**

**ABSTRACT
L E G I M A N ***

The enactment of the Consumer Protection Law (UUPK) represents the state's responsibility in providing protection to consumers, business actors and other related parties. There are values and principles of consumer protection in Islam, which normatively must be implemented by Muslims. Meanwhile, on the other hand, the Consumer Protection Law has been implemented as a positive law which regulates the protection of Indonesian consumers, including Muslim consumers; raises curiosity to obtain clarity on how consumer protection law is regulated according to the Consumer Protection Law and Islamic law.

The research method used is the type of research method chosen is descriptive analysis, which is based on statutory regulations carried out by reviewing all laws and regulations and a conceptual approach.

The research results from this thesis include: The legal regulation of online buying and selling from an Islamic economic perspective and the Consumer Protection Law still refers to the legal conditions for agreements in civil law and contracts in Islamic economic law. Online buying and selling in Islamic Economic Law is regulated in DSN/MUI Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 which states that sellers and buyers must be legally competent in accordance with sharia and statutory regulations. DSN-MUI Fatwa No.146/DSN-MUI/XII/2021 states that online shop users must understand and implement sharia economic principles such as honesty, fairness and responsibility so that online buying and selling activities run well. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates consumer rights contained in Article 4 and consumer obligations in Article 5. Implementation of online buying and selling from an Islamic economic perspective and the Consumer Protection Law must be carried out without violating religious provisions and regulations. legislation. The buying and selling scheme that must be considered is: First, it relates to the goods purchased. Second, how to buy it. Legal protection for consumers in online buying and selling from an Islamic economic perspective and the Consumer Protection Law both provide legal certainty for consumers by imposing responsibility on business actors to provide compensation for damage, pollution and/or losses to consumers resulting from consuming goods and/or services produced or traded

Keywords: Legal protection, consumers, online buying and selling, Islamic economics, consumer protection law

*Student of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.